



Paradoks Kebijakan Pembangunan Daerah dan Dinamika Siklus Kemiskinan Sistemik

The Paradox of Regional Development Policy and the Dynamics of the Systemic Poverty Cycle

Franky Djafar

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah
Gorontalo, Indonesia

Abstrak

Kemiskinan di Gorontalo masih menjadi persoalan serius dan mendesak, dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, sehingga menuntut perhatian kebijakan yang lebih inklusif dan terarah. Kemiskinan masih menjadi persoalan utama pembangunan, terutama ketika kebijakan lebih berfokus pada infrastruktur dibanding pemerataan kesejahteraan. Paradoks ini menciptakan vicious cycle of poverty yang bersifat sistemik, seperti yang juga terlihat di Gorontalo. Pola kemiskinan terjadi di wilayah pesisir dan pedesaan, diperkuat oleh keterbatasan pendidikan serta kesehatan yang menimbulkan kemiskinan lintas generasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pembangunan masih parsial, tumpang tindih, dan minim partisipasi. Program bantuan lebih bersifat konsumtif, sementara pembangunan infrastruktur tidak dibarengi peningkatan kualitas manusia. Kondisi ini memperkuat lingkaran kemiskinan. Kesimpulannya, diperlukan reorientasi kebijakan dari growth oriented menuju people oriented development, dengan menekankan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat untuk memutus kemiskinan sistemik secara berkelanjutan.

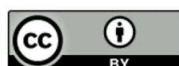
Kata Kunci: Paradoks pembangunan, siklus kemiskinan, kebijakan pemerintah, kemiskinan sistemik, Gorontalo

Abstract

Poverty in Gorontalo remains a serious and pressing issue, with poverty rates higher than the national average, demanding more inclusive and targeted policy attention. Poverty remains a key development issue, particularly when policies focus more on infrastructure than on equitable welfare. This paradox creates a systemic vicious cycle of poverty, as seen in Gorontalo. Poverty patterns occur in coastal and rural areas, reinforced by limited education and health, leading to intergenerational poverty. This research employed qualitative methods with a case study approach. Data were obtained through interviews, observation, and documentation, then analyzed interactively. The results show that development policies remain partial, overlapping, and lack participation. Aid programs are primarily consumer-oriented, while infrastructure development is not accompanied by improvements in human quality. This situation reinforces the cycle of poverty. In conclusion, a policy reorientation is needed from growth-oriented to people-oriented development, emphasizing education, health, and community empowerment to end systemic poverty sustainably.

Keywords: Development paradox, vicious cycle of poverty, government policy, systemic poverty, Gorontalo

How to Cite: Djafar, F., (2025). Paradoks Kebijakan Pembangunan Daerah dan Dinamika Siklus Kemiskinan Sistemik. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 7(2) 2025: 97-104



PENDAHULUAN

Kemiskinan hingga kini masih menjadi persoalan serius dalam pembangunan daerah di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan angka kemiskinan di Gorontalo mencapai 15,2%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 9,4%. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun pembangunan terus berjalan, capaian kesejahteraan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, khususnya kelompok rentan di wilayah pedesaan dan pesisir.

Berbagai penelitian sebelumnya menyoroiti kemiskinan dari perspektif ekonomi makro, misalnya keterkaitan antara pertumbuhan, pengangguran, dan distribusi pendapatan (Utomo, 2023). Studi lain menekankan efektivitas program bantuan sosial sebagai instrumen pengentasan kemiskinan (Mulyadi, 2016). Namun, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada dimensi ekonomi dan belum banyak yang menggali bagaimana kebijakan pembangunan daerah dengan orientasi pada infrastruktur justru berkontribusi terhadap reproduksi kemiskinan sistemik.

Di Gorontalo, paradoks pembangunan tampak jelas ketika infrastruktur dijadikan indikator utama keberhasilan, sementara aspek pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat belum mendapat perhatian yang proporsional. Akibatnya, program pembangunan yang diharapkan menciptakan kesejahteraan justru memperkuat ketimpangan sosial-ekonomi. Fenomena ini menunjukkan adanya *policy paradox*, di mana tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat berhadapan dengan realitas meningkatnya beban kemiskinan lintas generasi.

Kesenjangan ini menandakan adanya *research gap*. Masih terbatas penelitian yang secara khusus menganalisis kebijakan pembangunan daerah Gorontalo dari perspektif paradoks kebijakan dan kaitannya dengan siklus kemiskinan sistemik. Padahal, pemahaman mendalam terhadap dinamika tersebut penting untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir dengan kebaruan (*novelty*) berupa analisis kritis mengenai bagaimana paradoks kebijakan pembangunan daerah memperkuat lingkaran kemiskinan sistemik di Gorontalo. Tidak hanya memotret angka kemiskinan, penelitian ini menawarkan perspektif bahwa reorientasi kebijakan dari *growth-oriented* menuju *people-oriented development* menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan yang kronis dan berkelanjutan (Todaro & Smith, 2020).

Lebih jauh, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis dengan mengidentifikasi kelemahan mendasar dalam tata kelola pembangunan daerah, seperti tumpang tindih program, minimnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya integrasi antara kebijakan pusat dan daerah (World Bank, 2022). Fokus ini menjadi pembeda dari studi terdahulu yang cenderung menitikberatkan pada efektivitas program bantuan semata (Mulyadi, 2016; Utomo, 2023). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menawarkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam memahami hubungan antara kebijakan pembangunan dan reproduksi kemiskinan.

Selain itu, penelitian ini relevan secara akademik karena memperkuat wacana tentang *policy paradox* dalam kajian administrasi publik (Stone, 2012). Analisis terhadap Gorontalo dapat dijadikan studi kasus yang merepresentasikan problematika pembangunan di daerah lain di Indonesia. Dengan menekankan paradoks kebijakan pembangunan daerah, penelitian ini tidak hanya memberikan temuan empiris, tetapi juga memperkaya literatur mengenai hubungan antara kebijakan publik, pembangunan, dan kemiskinan sistemik dalam konteks negara berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan menggambarkan secara mendalam paradoks kebijakan pembangunan daerah dan keterkaitannya dengan siklus *vicious poverty* di Gorontalo. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap realitas sosial, persepsi, serta dinamika kemiskinan sistemik yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka statistik (Creswell, 2018).

Lokasi penelitian difokuskan pada wilayah pesisir dan pedesaan di Gorontalo yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi berdasarkan data **Badan Pusat Statistik (BPS, 2023)**, di mana angka kemiskinan mencapai 15,2% atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 9,4%. Subjek penelitian terdiri dari masyarakat miskin (nelayan tradisional dan petani), aparat pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* untuk memilih individu yang relevan dengan fokus penelitian, serta *snowball sampling* untuk memperluas jejaring responden yang memiliki informasi penting. Namun, teknik *purposive sampling* berpotensi menimbulkan bias karena sangat bergantung pada subjektivitas peneliti dalam menentukan informan (Sugiyono, 2019). Untuk mengurangi potensi bias tersebut, peneliti menggunakan teknik triangulasi data agar hasil tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilaksanakan dengan masyarakat serta pejabat terkait untuk menggali pengalaman langsung dan pandangan mereka terhadap kebijakan pembangunan. Observasi dilakukan guna melihat kondisi objektif di lapangan, sedangkan studi dokumentasi mencakup analisis data BPS, RPJMD, laporan pemerintah, serta literatur akademik yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi, tabel, maupun gambar untuk memperjelas pola kemiskinan sistemik. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu dengan membandingkan informasi dari masyarakat, aparat pemerintah, dan dokumen resmi. Dengan demikian, keterbatasan metode dapat diminimalisasi, dan hasil penelitian memiliki kredibilitas akademik yang lebih tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paradoks Pembangunan Daerah

Paradoks pembangunan daerah di Gorontalo menegaskan adanya jurang antara logika pertumbuhan ekonomi berbasis infrastruktur dan realitas sosial masyarakat yang masih bergulat dengan kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan angka kemiskinan mencapai 15,2%, lebih tinggi dari rata-rata nasional, meskipun pembangunan fisik dan infrastruktur terus digenjot. Temuan ini sejalan dengan kritik terhadap paradigma pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan (*growth-oriented development*) tanpa diimbangi dengan strategi pemerataan. Seperti dikemukakan oleh Nurjihadi dan Dharmawan (2016), pendekatan semacam ini berisiko melahirkan kemiskinan baru karena tidak menyentuh akar persoalan struktural di tingkat masyarakat bawah.

Dalam perspektif teori pembangunan, keberpihakan pada infrastruktur memang dapat meningkatkan konektivitas dan mendorong mobilitas ekonomi, tetapi dampaknya sering tidak langsung dirasakan oleh kelompok miskin. Di Gorontalo, sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal justru belum ditempatkan sebagai prioritas kebijakan.

Hal ini memperkuat tesis bahwa investasi di sektor primer lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan pedesaan dibandingkan proyek jangka pendek atau program bantuan sementara. Dengan demikian, kegagalan pembangunan daerah bukan terletak pada absennya pertumbuhan, melainkan pada bias orientasi kebijakan yang kurang menyentuh basis ekonomi rakyat kecil.

Kelemahan tata kelola juga memperparah paradoks pembangunan ini. Program pembangunan dari pusat kerap diadopsi begitu saja oleh pemerintah daerah tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, sehingga efektivitasnya terbatas. Dimas et al. (2024) menekankan bahwa lemahnya koordinasi lintas level pemerintahan dan minimnya kapasitas daerah dalam mengelola pembangunan memperkuat kemiskinan struktural di daerah. Situasi ini tidak hanya menghasilkan pemborosan sumber daya, tetapi juga menegaskan posisi daerah sebagai penerima kebijakan, bukan sebagai perancang pembangunan yang kontekstual.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih lemah. Forum Musrenbang yang seharusnya menjadi wadah artikulasi aspirasi publik sering kali hanya bersifat formalitas. Kondisi ini mengonfirmasi temuan Prawoto (2009) bahwa kelompok miskin memiliki posisi tawar yang lemah dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang lahir cenderung bias kepentingan elite. Akibatnya, masyarakat miskin di pedesaan dan pesisir tetap menjadi kelompok marjinal yang tidak terakomodasi dalam agenda pembangunan.

Paradoks pembangunan daerah di Gorontalo juga semakin jelas jika dianalisis melalui kerangka kemiskinan multidimensional. Seperti dijelaskan dalam tinjauan sistematis terbaru (Quality & Quantity, 2023), kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, layanan dasar, dan partisipasi sosial. Walaupun pembangunan infrastruktur fisik meningkat, masyarakat pesisir dan pedesaan Gorontalo masih mengalami keterbatasan layanan dasar, sehingga lingkaran kemiskinan tetap bertahan. Perspektif ini menegaskan bahwa kebijakan pembangunan yang terlalu moneteristik gagal menangkap kompleksitas deprivasi yang dialami masyarakat miskin.

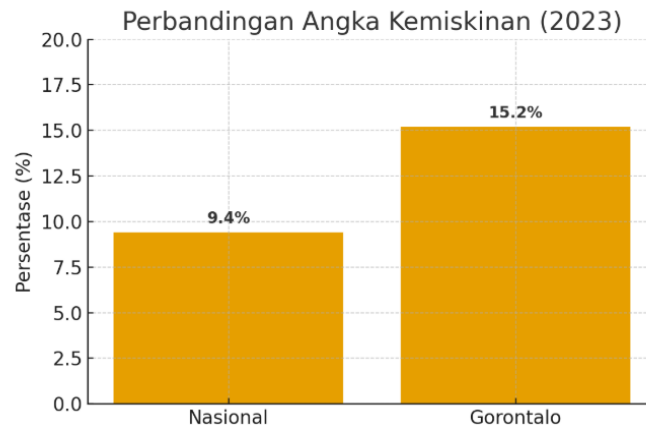
Jika ditinjau dengan kerangka teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang dikemukakan Nurkse (1961), kondisi Gorontalo memperlihatkan bahwa rendahnya pendapatan masyarakat mengakibatkan keterbatasan modal dan rendahnya produktivitas. Situasi ini menciptakan ketergantungan struktural yang sulit diputus tanpa intervensi kebijakan yang tepat sasaran. Sejalan dengan pandangan Todaro dan Smith (2015), pembangunan tidak dapat hanya dipahami sebagai pertumbuhan ekonomi semata, melainkan harus mencakup upaya mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, dan menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Oleh karena itu, strategi pembangunan di Gorontalo perlu diarahkan pada penguatan sektor basis, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengelolaan kebijakan yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

Kebijakan Pemerintah dan Siklus Vicious Kemiskinan

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan sering kali dihadapkan pada dilema antara mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Di banyak daerah, termasuk Gorontalo, program pembangunan lebih diarahkan pada infrastruktur fisik, namun belum berhasil memutus rantai kemiskinan yang telah berlangsung lama. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan angka statistik tidak cukup efektif untuk mengatasi akar persoalan kemiskinan yang bersifat multidimensi.

Siklus *vicious poverty* terbentuk ketika rendahnya pendapatan masyarakat berimplikasi pada rendahnya kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia tetap rendah dan memperkuat lingkaran ketidakberdayaan. Utomo (2023) menegaskan bahwa tanpa kebijakan yang mampu menysar

perbaikan kualitas manusia, masyarakat miskin akan terus terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan. Dalam konteks Gorontalo, hal ini tercermin dari tingginya angka kemiskinan di pedesaan, meskipun pembangunan infrastruktur telah meningkat.



Gambar 1. Perbandingan Angka Kemiskinan Nasional dan Gorontalo Tahun 2023

Grafik di atas menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Gorontalo (15,2%) jauh di atas rata-rata nasional (9,4%) (BPS, 2023). Fakta ini menegaskan adanya paradoks pembangunan: meskipun infrastruktur berkembang, kesejahteraan masyarakat tidak mengalami peningkatan signifikan. Visualisasi ini memperkuat analisis bahwa kebijakan pembangunan yang kurang tepat sasaran dapat memperkuat siklus *vicious poverty* di daerah.

Program pemerintah yang bersifat sementara dan parsial justru memperparah siklus kemiskinan ini. Bantuan sosial, misalnya, meskipun membantu secara instan, tidak selalu mendorong kemandirian masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurjihadi dan Dharmawan (2016), kebijakan yang tidak disertai strategi pemberdayaan justru melahirkan ketergantungan baru pada negara dan memperkuat lingkaran kemiskinan struktural. Fenomena ini banyak dijumpai di wilayah pedesaan, di mana bantuan bersifat konsumtif lebih dominan dibandingkan investasi produktif.

Selain itu, kebijakan pemerintah yang tumpang tindih antara pusat dan daerah membuat penanganan kemiskinan tidak efektif. Dimas et al. (2024) menyebutkan bahwa lemahnya koordinasi antarlevel pemerintahan serta ketidaksinkronan program menyebabkan kemiskinan struktural sulit diatasi. Hal ini terlihat jelas ketika kebijakan nasional tidak selalu sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga implementasi di daerah sering kali gagal mencapai sasaran. Gorontalo sebagai daerah dengan angka kemiskinan tinggi menjadi contoh nyata dari lemahnya sinkronisasi kebijakan tersebut.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah yang tidak dirancang secara holistik berpotensi melanggengkan siklus *vicious poverty*. Infrastruktur boleh jadi bertambah, tetapi tanpa integrasi dengan program peningkatan kualitas manusia dan pemberdayaan ekonomi, masyarakat miskin akan tetap terjebak dalam ketidakberdayaan. Seperti ditegaskan oleh Lubis (2020), pendekatan kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif jauh lebih efektif dalam memutus rantai kemiskinan dibandingkan kebijakan *top-down* yang hanya menekankan output pembangunan.

Kemiskinan Sistemik di Wilayah Penelitian

Kemiskinan yang terjadi di wilayah penelitian menunjukkan sifat yang sistemik, artinya bukan sekadar keterbatasan ekonomi individu, melainkan hasil dari struktur sosial dan kebijakan yang kurang berpihak pada kelompok rentan. Di Gorontalo, wilayah pesisir dan

pedesaan menjadi kantong utama kemiskinan karena bergantung pada sektor primer yang rawan fluktuasi. Hal ini sejalan dengan temuan Nurjihadi dan Dharmawan (2016) yang menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan cenderung terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan akibat rendahnya akses terhadap sumber daya produktif.

Di wilayah pesisir, nelayan tradisional sangat bergantung pada hasil tangkapan yang dipengaruhi musim dan cuaca. Ketidakpastian pendapatan membuat mereka sulit menabung atau berinvestasi untuk masa depan. Selain itu, minimnya akses pada pendidikan dan layanan kesehatan memperburuk kondisi kesejahteraan keluarga nelayan. Dampaknya adalah terjadinya kemiskinan antargenerasi, di mana anak-anak nelayan juga cenderung melanjutkan profesi orang tua mereka dengan tingkat kesejahteraan yang sama rendahnya.

Di pedesaan, petani menghadapi masalah produktivitas rendah karena masih menggunakan teknologi tradisional serta keterbatasan akses ke pasar. Harga komoditas yang fluktuatif membuat pendapatan mereka tidak menentu. Dimas et al. (2024) menegaskan bahwa kondisi ini memperlihatkan bentuk kemiskinan struktural yang sulit diatasi hanya dengan intervensi sesaat. Ketergantungan pada bantuan pemerintah menjadi salah satu ciri khas kemiskinan sistemik di wilayah ini.

Keterbatasan pendidikan dan layanan kesehatan memperkuat kondisi kemiskinan di kedua wilayah tersebut. Rendahnya tingkat pendidikan membatasi keterampilan masyarakat untuk berpindah ke sektor yang lebih produktif, sementara buruknya akses kesehatan membuat beban ekonomi semakin berat. Utomo (2023) menegaskan bahwa tanpa kebijakan holistik yang meningkatkan kualitas manusia, masyarakat miskin akan terus terjebak dalam *vicious cycle of poverty*.

Untuk menggambarkan pola kemiskinan sistemik di wilayah penelitian, tabel berikut menyajikan karakteristik utama, faktor pendukung, dan dampaknya:

Tabel 1. Pola Kemiskinan Sistemik di Wilayah Pesisir dan Pedesaan

Wilayah	Karakteristik Utama	Faktor Pendukung Kemiskinan	Dampak
Pesisir	Nelayan tradisional bergantung pada hasil laut	Ketidakpastian cuaca/musim, akses pendidikan & kesehatan rendah	Pendapatan tidak stabil, kemiskinan antargenerasi, ketergantungan bantuan
Pedesaan	Petani dengan teknologi tradisional	Produktivitas rendah, pasar terbatas, harga komoditas fluktuatif	Pendapatan tidak menentu, keterbatasan mobilitas sosial, ketergantungan struktural

Tabel 1, menunjukkan bahwa kemiskinan sistemik tidak hanya bersumber dari rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial, pendidikan, kesehatan, serta akses pada sumber daya ekonomi. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa strategi pengentasan kemiskinan di Gorontalo harus lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal ketimbang sekadar intervensi jangka pendek.

Alternatif Solusi

Upaya mengatasi kemiskinan sistemik di Gorontalo menuntut pendekatan pembangunan yang lebih komprehensif daripada sekadar pembangunan infrastruktur fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan di daerah ini cenderung menekankan pada aspek pertumbuhan ekonomi berbasis infrastruktur, sementara dimensi pemerataan kesejahteraan masyarakat masih terabaikan. Dalam perspektif teori pembangunan, hal ini mencerminkan pendekatan *growth-oriented* yang menitikberatkan pada indikator makro ekonomi, tetapi gagal

menjawab akar persoalan kemiskinan struktural. Sejalan dengan pandangan Nurjihadi dan Dharmawan (2016), pembangunan yang berorientasi pada proyek ekonomi semata justru melahirkan pola ketergantungan baru yang semakin mengunci masyarakat dalam lingkaran kemiskinan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan merupakan prasyarat penting untuk memutus *vicious cycle of poverty*. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan berimplikasi langsung pada rendahnya produktivitas masyarakat miskin di Gorontalo. Dalam kerangka teori modal manusia, investasi pada peningkatan kualitas manusia dianggap sebagai jalan strategis untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan mobilitas sosial. Utomo (2023) bahkan menekankan bahwa pembangunan manusia merupakan fondasi utama untuk keluar dari jerat kemiskinan berkelanjutan.

Selanjutnya, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa penguatan ekonomi lokal, khususnya di sektor pertanian dan perikanan, merupakan strategi efektif untuk menekan kerentanan masyarakat miskin. Hal ini sejalan dengan teori pembangunan berbasis masyarakat yang menekankan pentingnya kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan lokal. Dimas et al. (2024) menegaskan bahwa pembangunan yang berorientasi pada penguatan kapasitas ekonomi lokal lebih berkelanjutan dibandingkan intervensi *top-down* yang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan kontekstual daerah.

Dari sisi tata kelola, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menunjukkan lemahnya penerapan prinsip partisipatif dalam pembangunan daerah. Secara teoretis, hal ini memperkuat argumentasi Prawoto (2009) bahwa kelompok miskin cenderung memiliki posisi tawar rendah sehingga tidak mampu memengaruhi arah kebijakan publik. Lubis (2020) menambahkan bahwa partisipasi yang otentik dan inklusif menjadi kunci agar pembangunan benar-benar merefleksikan kebutuhan masyarakat.

Akhirnya, sinergi multipihak antara pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta menjadi faktor penting yang dapat memperkuat efektivitas pembangunan. Hal ini sejalan dengan teori tata kelola kolaboratif, di mana keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada koordinasi dan kolaborasi antaraktor. Mulyadi (2016) menegaskan bahwa pemerintah idealnya berfungsi sebagai fasilitator yang membuka ruang partisipasi dan memberdayakan masyarakat, bukan hanya sebagai penyedia program.

Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa untuk mengatasi kemiskinan di Gorontalo diperlukan transformasi paradigma pembangunan menuju model yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan daerah di Gorontalo masih menghadapi paradoks besar. Orientasi kebijakan yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur belum berhasil mengatasi kemiskinan struktural yang berakar dalam masyarakat. Tingginya angka kemiskinan, terutama di wilayah pesisir yang bergantung pada perikanan tradisional serta di pedesaan dengan produktivitas pertanian rendah, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan semakin memperkuat kemiskinan lintas generasi yang sulit diputuskan.

Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya reorientasi strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis masyarakat. Pemerintah daerah tidak cukup hanya

mengandalkan pembangunan fisik, melainkan juga harus memberi perhatian serius pada penguatan kualitas sumber daya manusia. Investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal menjadi langkah mendesak. Pola pembinaan UMKM yang lebih kontekstual melalui pendekatan berbasis kluster juga dapat membantu meningkatkan kapasitas pelaku usaha sesuai dengan karakteristik sosial-ekonomi setempat.

Dalam tataran implementasi, program pembangunan perlu diintegrasikan secara lintas sektor dan lintas level pemerintahan agar tidak tumpang tindih. Musrenbang sebagai forum perencanaan harus diperkuat agar partisipasi masyarakat lebih nyata dan substantif. Kolaborasi multipihak—antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan komunitas lokal—juga penting untuk memperkaya inovasi kebijakan. Di tingkat desa, penguatan kelembagaan seperti koperasi dan kelompok usaha bersama dapat menjadi sarana untuk memperluas akses permodalan, teknologi, dan pasar bagi masyarakat miskin.

Kontribusi akademis dari penelitian ini terletak pada penajaman analisis mengenai paradoks pembangunan daerah. Jika sebagian besar studi cenderung menekankan dimensi makroekonomi, penelitian ini menyoroti dinamika di tingkat lokal, termasuk strategi adaptif masyarakat miskin dan UMKM dalam merespons keterbatasan program pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya memperlihatkan kondisi empiris di Gorontalo, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual yang dapat memperkaya literatur tentang pembangunan daerah yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2023). Persentase penduduk miskin menurut provinsi 2020–2023. BPS RI. <https://www.bps.go.id>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dimas, R., Pratama, A., & Lestari, F. (2024). Tata kelola pembangunan daerah: Tantangan koordinasi lintas pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 33–50.
- Lubis, A. (2020). *Pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat: Teori dan praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mulyadi, D. (2016). *Administrasi publik dan tata kelola kolaboratif*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi. (2016). Efektivitas program bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 3(2), 101–115.
- Nurjihadi, J., & Dharmawan, A. H. (2016). Paradigma pembangunan dan implikasinya terhadap kemiskinan struktural di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(2), 121–138.
- Nurkse, R. (1961). *Problems of capital formation in underdeveloped countries*. Oxford University Press.
- Prawoto, N. (2009). *Ekonomi kerakyatan: Teori, kebijakan, dan implementasi*. Yogyakarta: BPFPE.
- Quality & Quantity. (2023). A systematic review of multidimensional poverty measurement: Approaches and challenges. *Quality & Quantity*, 57(6), 2873–2892. <https://doi.org/10.1007/s11135-022-01598-3>
- Stone, D. (2012). *Policy paradox: The art of political decision making* (3rd ed.). W.W. Norton & Company.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson Education.
- Utomo, R. B. (2023). Pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan distribusi pendapatan: Analisis makroekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 12(1), 45–60.
- World Bank. (2022). *Indonesia economic prospects: Boosting the recovery*. The World Bank Group. <https://www.worldbank.org>